

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang diadopsi hampir seluruh negara melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (United Nations, 2025). *Division for Sustainable Development Goals* (DSDG) in the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) menegaskan bahwa SDGs dirancang sebagai kerangka *universal* untuk menjawab tantangan multidimensional, mulai dari kemiskinan, ketimpangan, degradasi lingkungan, hingga tata kelola ekonomi yang berkeadilan (United Nations, 2025). Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut meratifikasi komitmen ini dan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kebijakan BUMN, dengan arahan presiden untuk pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi (Bapenas, 2024).

Peran *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau yang biasa disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan semakin menonjol seiring meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Uyun et al., 2024). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan bentuk komitmen BUMN dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak lagi bersifat filantropis, melainkan strategis dan terintegrasi dengan visi

bisnis (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, setiap BUMN, termasuk PT Petrokimia Gresik, dituntut untuk berkontribusi aktif melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dasar hukum pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam beberapa regulasi, pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat (1), menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (UU PT, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. PP (2012) juga menegaskan mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, termasuk tata kelola, pengelolaan dana, dan pelaporan. Di Tingkat kementerian, kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi BUMN diperkuat melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, yang menekankan prinsip *Creating Shared Value (CSV)*. Dengan demikian, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) harus terintegrasi strategi bisnis yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Kementerian BUMN, 2023).

PT Petrokimia Gresik sebagai anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) memegang peran strategis tidak hanya sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial melalui implementasi beragam program yang diarahkan pada

pemberdayaan masyarakat, penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah oprasional (SR, 2022, 2023, 2024). Dalam Laporan Tahunan, PT Petrokimia Gresik menegaskan komitmennya menyalurkan dana kemitraan untuk memperkuat kapasitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal sebagai bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (LRK, 2024). Dana kemitraan tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada mitra binaan dan dicatat sebagai piutang pinjaman mitra binaan dalam laporan keuangan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik (LRK, 2022, 2023, 2024).

Dalam pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dana kemitraan yang disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berimplikasi langsung terhadap pembentukan dan kualitas aset neto program. Aset neto pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik mencerminkan kemampuan keuangan bersih program setelah memperhitungkan kewajiban yang ada, sehingga menjadi indikator penting bagi keberlanjutan pendanaan dan stabilitas keuangan program. Efektivitas aset neto sangat dipengaruhi oleh perputaran kas, di mana perputaran kas yang optimal menunjukkan bahwa dana kemitraan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sedangkan perputaran kas yang rendah berpotensi menurunkan kualitas aset neto dan meningkatkan risiko keuangan. Umayah & Hamidah (2025) menegaskan bahwa pengelolaan aset neto yang sehat harus didukung oleh perputaran kas yang efektif guna menjaga keberlanjutan program dan akuntabilitas keuangan.

Sehubungan dengan perputaran kas dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), salah satu komponen utama

yang mempengaruhi arus kas masuk adalah piutang pinjaman kepada mitra binaan. Piutang didefinisikan sebagai klaim perusahaan terhadap pihak lain yang wajib dibayar pada waktu tertentu (Daud Yusuf & Muhammad Rosidi, 2024; Umayah & Hamidah, 2025). Namun, sebagaimana praktik pada sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan, tidak semua rupiah yang dipinjamkan atau disalurkan memiliki kemungkinan untuk kembali (Gloria Tampi et al., 2019). Tingginya piutang yang tidak tertagih dapat mengurangi efektivitas program, sebab dana yang macet tidak dapat diputar kembali (Mustofah & Cahyadi, 2022).

Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDGs), pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki keterkaitan dengan pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 2 (Tanpa Kelaparan). Keberlanjutan penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan piutang, karena piutang yang tidak tertagih secara optimal dapat membatasi kapasitas pendanaan program (Viddiawati & Lasiyono, 2021). Apabila jumlah piutang yang tidak tertagih meningkat dan aset neto program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik menurun, maka kemampuan program dalam menyalurkan bantuan modal dan pemberdayaan kepada masyarakat serta pelaku usaha akan berkurang, sehingga memperlebar kesenjangan sosial ekonomi (BPS, 2023). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta penguatan ketahanan pangan, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bergerak di sektor pertanian dan usaha pendukung pangan (Nurmala et al., 2023). Dengan demikian, pengelolaan keuangan program yang

efektif menjadi faktor penting dalam mendukung kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap pencapaian SDG 1 dan SDG 2.

Selanjutnya, pelaksanaan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) juga sejalan dengan pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pemberian akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi (UMK). Kualitas pengelolaan piutang dan stabilitas aset neto program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memengaruhi kemampuan program dalam mendukung pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan nilai ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga kewajaran penyajian laporan keuangan dan memperkuat tata kelola program, perusahaan membentuk alokasi penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan ketentuan PSAK 71 yang mengatur pengakuan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) sejak awal pengakuan piutang bukan hanya saat terjadi gagal bayar (IAI, 2016)

Penerapan PSAK 71 terbukti berdampak signifikan terhadap cadangan kerugian piutang (Kartin et al., 2023). Penelitian Firmansyah & Nizar Arifullah (2021) menunjukkan bahwa penerapan kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss/ ECL*) meningkatkan beban pencadangan piutang pada perbankan Indonesia, yang pada gilirannya menurunkan profitabilitas jangka pendek. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Maurida (2022), bahwa pencadangan kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss/ ECL*) mempersempit ruang ekspansi lembaga pembiayaan karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menutupi risiko piutang.

Saputra (2017) menegaskan bahwa penyisihan piutang yang tinggi mengurangi fleksibilitas keuangan BUMN dalam menjalankan

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik. Firmansyah & Nizar Arifullah (2021); Maurida (2022) juga menjelaskan bahwa semakin besar jumlah piutang yang tidak tertagih, semakin besar beban pencadangan yang harus diakui dalam laporan keuangan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Kurniasari & Widyawati (2023) menekankan bahwa diperlukan tata kelola (*governance*) yang kuat dalam pengelolaan piutang untuk menjaga kesehatan keuangan organisasi nirlaba. Meskipun dalam konteks yang berbeda, mekanisme serupa juga berlaku dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik.

Menurut Kieso et al. (2013, 2016) dalam metode *percentage of sale* atau *percentage of receivables*, penentuan beban terkait dengan akun tidak tertagih (*uncollectible accounts*) memerlukan tingkat pertimbangan yang tinggi (*requires a large degree of judgment*), sehingga perusahaan perlu didukung oleh pengungkapan piutang yang memadai agar risiko tidak tertagih dapat dinilai dengan tepat. Tingkat pertimbangan tersebut akan memengaruhi besarnya estimasi kerugian piutang yang diakui perusahaan. Semakin tinggi tingkat piutang, semakin besar pula penyisihan yang harus diakui, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan aset neto perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Umayah & Hamidah, 2025) yang menekankan bahwa peningkatan cadangan kerugian piutang mengurangi nilai tercatat aset sehingga menurunkan aset neto. Aset neto sendiri merupakan selisih antara total aset dan kewajiban yang menggambarkan kekayaan bersih program (Harahap, 2020 dalam Sarif et al., 2023).

Studi mengenai piutang dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN masing tergolong terbatas. Sebagian besar riset hanya menyoroti aspek filantropi atau dampak ekonomi

TJSL secara umum, tanpa melihat detail akuntansi piutang dan penyisihan kerugian dalam program pendanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap dengan mengaitkan aspek teknis akuntansi (PSAK 71, penyisihan piutang, dan aset neto) dengan pengujian hubungan empiris antarvariabel yang merujuk pada penelitian terdahulu. Dikaitkan pada aspek keberlanjutan (SDGs, *stakeholder*, dan legitimasi).

Dengan demikian, analisis mendalam mengenai pengaruh piutang dan penyisihan piutang terhadap aset neto dalam program pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis dalam bidang akuntansi keuangan dan manajemen program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi manajemen BUMN dalam mengelola risiko program sosial. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat memperkuat kontribusi BUMN terhadap pencapaian SDGs melalui tata kelola program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan inklusif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi piutang PUMK dan alokasi penyisihan piutang PUMK dalam Program PUMK Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik?
2. Apakah piutang PUMK dan alokasi penyisihan piutang PUMK berpengaruh terhadap aset neto program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT Petrokimia Gresik?

3. Bagaimana strategi pengelolaan piutang PUMK beserta dampaknya terhadap keberlanjutan aset neto program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini Adalah:

1. Menganalisis kondisi piutang PUMK dan alokasi penyisihan piutang PUMK dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik.
2. Menganalisis pengaruh piutang PUMK dan alokasi penyisihan piutang PUMK terhadap aset neto program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik.
3. Menganalisis strategi pengelolaan piutang PUMK beserta dampaknya terhadap keberlanjutan aset neto program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna serta berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan, khususnya mengenai penerapan PSAK 71 dalam pengelolaan piutang pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Penelitian ini juga memperkaya perspektif akademik dengan mengaitkan aspek akuntansi, seperti piutang, alokasi penyisihan piutang, dan aset

neto, dengan kerangka keberlanjutan yang diatur dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, penelitian ini menambah kajian mengenai keterkaitan teori akuntansi, teori legitimasi, dan, sehingga dapat memperluas basis pengetahuan di bidang akuntansi keuangan, manajemen, serta studi keberlanjutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi PT Petrokimia Gresik sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan piutang Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), terutama dalam meningkatkan akurasi alokasi pencadangan kerugian piutang serta menjaga transparansi laporan keuangan. Bagi Kementerian BUMN, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan TJSL agar lebih efektif, strategis, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mitra binaan, karena memberikan pemahaman penting mengenai kedisiplinan pembayaran agar dana bergulir dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh pelaku usaha lain.